

HEGEMONI IDENTITAS NASIONAL DALAM BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

Febri Nurrahmi

Program Studi Ilmu Komunikasi

FISIP Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 23111.

Email: febri.nurrahmi@unsyiah.ac.id

Abstrak

Pemerintah Orde Baru menanamkan kesadaran nasional dengan melalui wacana identitas nasional. Identitas nasional tersebut dimunculkan melalui buku teks mata pelajaran sejarah untuk menciptakan kesamaan historis sebagai satu bangsa. Tujuan dari kesamaan historis adalah membentuk perasaan senasib. Penulis mencoba menguraikan beberapa contoh mitos politik yang terdapat dalam teks sejarah nasional dengan menggunakan metode *cross-reference*. Penulis menemukan bahwa buku teks sejarah sebagai media massa tradisional menjadi instrumen hegemoni pemerintah Orde Baru guna memunculkan perasaan senasib sehingga menerima identitas sebagai satu bangsa. Namun identitas nasional yang dimunculkan tidak merepresentasikan budaya Indonesia secara keseluruhan tetapi cenderung pada kebudayaan Jawa (Jawa-sentris).

Kata Kunci: Hegemoni, Identitas Nasional, Buku Sejarah

Abstract

The New Order government instilled national consciousness through the discourse of national identity. The national identity is generated through textbooks of historical subjects to raise historical similarities as one nation. The purpose of historical similarity is to share the same fate. The author tries to describe some examples of political myths contained in the national historical text using a cross-reference method. The author found that the textbook of history as a traditional mass media became a hegemony instrument of the New Order government in order to share the same fate so as to accept the identity as a nation. But the national identity does not represent the culture of Indonesia as a whole but it tends to the Javanese culture (Java-centric).

Keywords: Hegemony, National Identity, History Book

A. Pendahuluan

“Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua,” semboyan ini telah didegung-degungkan sejak duduk di bangku Sekolah Dasar. Keanekaragaman budaya, agama, adat istiadat, suku dan bahasa di Indonesia diyakini dapat saling melengkapi dan memperkaya khazanah kebudayaan Indonesia. Namun seperti dua mata pisau,

keanekaragaman ini dapat menjadi ancaman bagi integrasi nasional karena perbedaan berpotensi menimbulkan perpecahan jika tidak dipelihara dengan hati-hati. Ditambah lagi dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke.

Kondisi Indonesia ini menjadi suatu tantangan bagi terbentuknya negara kesatuan yang membutuhkan loyalitas dari setiap warga negaranya. Karena sejatinya konsep bangsa adalah suatu konsep imajiner. Menurut Anderson, bangsa dikatakan sebagai komunitas yang dibayangkan karena setiap anggota dari komunitas yang disebut bangsa tersebut tidak pernah saling mengenal satu-sama lain, tapi mereka membayangkan serta mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok.¹

Lebih lanjut, disebutkan bahwa munculnya kesadaran sebagai suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan isu nasionalisme. Nasionalisme merupakan kesadaran dari setiap warga negara Indonesia sebagai satu bangsa. Dengan adanya nasionalisme ini diharapkan loyalitas etnis atau agama dapat digiring pada loyalitas terhadap negara Indonesia. Ada tiga faktor yang merupakan unsur pokok dari nasionalisme, yaitu tradisi, kepentingan, dan cita-cita.² Tradisi berhubungan dengan masa lampau; kepentingan berhubungan dengan masa sekarang; cita-cita berhubungan dengan masa yang akan datang. Ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pembentukan rasa kebangsaan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sarana yang sangat efektif untuk menumbuhkan rasa kebangsaan tersebut. Salah satunya melalui pemahaman terhadap sejarah bangsanya.

Sejarah dapat mempersatukan perasaan (*sentiment*) serta tindakan (*action*) dan dengan demikian dapat membangkitkan kesadaran nasional sebagai satu bangsa. Di dalam sejarah nasional tercantum paham-paham yang dapat mempersatukan suatu bangsa. Menurut Arthur Schopenhauer, “hanya dengan sejarah suatu bangsa menjadi sadar akan dirinya sepenuh-penuhnya.” Kesadaran nasional sebenarnya terutama timbul dari pemahaman terhadap masa lalu, perasaan bangsa atas kejadian-kejadian dalam masa yang lampau. Hal ini diperkuat oleh ucapan seorang ahli sejarah Perancis, Fustel de Coulanges, yang

¹ Benedict Anderson. (2008). *Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang)*. Jakarta: Insist Press & Pustaka Pelajar.

² Sartono Kartodirdjo, (1982). *Pemikiran Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.

mengatakan patriotisme sejati terutama bukan cinta kepada tanah, tetapi cinta kepada masa lampau, yaitu kekhidmatan terhadap generasi-generasi yang mendahului kita. Dengan demikian jelas bahwa penulisan sejarah Indonesia mempunyai fungsi penting dalam membangun kesadaran nasional sebagai suatu bangsa.

Menurut Anderson³, seseorang atau sekelompok orang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa dengan mengidentifikasi kesamaan. Semakin banyak kesamaan yang ada, maka semakin kuat rasa sebagai satu bangsa. Perasaan sebagai suatu bangsa dimunculkan salah satunya dengan cerita (mitos/mite) yang muncul belakangan, dikaitkan dengan mitos yang terjadi sebelumnya, yang sebenarnya tidak ada kaitannya.

Dalam konteks Indonesia yang plural, persamaan nasib kesejarahan menjadi faktor pemersatu Indonesia di tengah perbedaan yang ada. Sehingga buku teks sejarah mempunyai misi dalam pembentukan kepribadian bangsa yang utuh. Dasar yang dijadikan acuan bagi kepribadian bangsa adalah penghargaan terhadap perjuangan bangsa. Peristiwa sejarah dijadikan sebagai acuan nilai bagi pembentukan pribadi warga negara. Oleh karena itu, sejarah merupakan salah satu faktor penting pembentukan nasionalisme Indonesia.

Sejarah ditransformasikan melalui pewarisan nilai. Institusi yang sangat penting bagi penanaman nilai kesejarahan adalah lembaga pendidikan yaitu sekolah. Secara teknis penanaman nilai kesejarahan di sekolah dengan disediakannya buku teks pelajaran sejarah. Buku-buku teks sejarah merupakan suatu karya historiografi. Historiografi merupakan rekonstruksi masa lampau. Dalam merekonstruksi ini, seorang penulis sejarah akan memberikan interpretasi terhadap fakta-fakta yang ia rekonstruksikan. Fakta-fakta tidak bisa “berbicara” sendiri. Sejarawan atau penulis sejarahlah yang kemudian dapat menjadikan fakta itu mampu “berbicara”.

Kemampuan sejarawan atau penulis sejarah dalam merekonstruksi fakta-fakta tersebut akan sangat berkaitan latar belakang budaya, serta kondisi sosial politik pada saat itu. Dalam konteks ini, penulisan sejarah dipengaruhi oleh kebijakan politik pemerintah dalam bidang pendidikan. Secara konseptual kebijakan pemerintah di bidang pendidikan

³ Benedict Anderson. (2008). *Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang)*. Jakarta: Insist Press & Pustaka Pelajar.

yang berkaitan dengan mata pelajaran akan dituangkan dalam kurikulum. Apa yang digariskan pemerintah dalam kurikulum dapat memberikan pengaruh bahkan dijadikan acuan dalam penulisan buku sejarah.

Wajar jika pemerintah khususnya Orde Baru menaruh perhatian yang besar dalam penulisan sejarah. Pemerintah Orde Baru merupakan pihak yang memiliki kepentingan yang sangat besar bagi pembentukan kesadaran nasional. Kesadaran nasional dapat dijadikan sebagai dasar bagi loyalitas warga negara terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, peristiwa sejarah bangsa akan dijadikan dasar legitimasi bagi kepentingan penguasa. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis sejarah yang direkonstruksi dalam buku teks pelajaran sejarah di masa Orde Baru. Namun penulis menyadari bahwa sejarah bersifat subjektif. Oleh karena itu penulis akan melakukan *cross-reference* dari berbagai sumber yang teruji keabsahannya.

B. Pembahasan

1. Historiografi Indonesia

Penulisan sejarah atau historiografi suatu bangsa memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan bangsa itu sendiri. Sejarah yang memiliki arti bahwa perjalanan di masa lampau harus dipertanggungjawabkan. Dalam mempertanggungjawabkan masa lampainya, mereka berupaya memberikan makna terhadap perjalanan sejarahnya. Peran-peran atau tindakan-tindakan masa lalunya adalah sesuatu yang sangat menentukan bagi pembentukan diri dan bangsanya. Dengan demikian masa lampau adalah sesuatu dinamika yang memberikan arti dan makna.

Pemaknaan terhadap peristiwa masa lampau sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosio-kultural dari masyarakatnya. Dalam masyarakat yang masih tradisional, sikap kritis terhadap rekonstruksi masa lampau tidak terjadi. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa perubahan yang terjadi dalam diri manusia dan di lingkungannya, bukan ditentukan oleh manusia itu sendiri, tetapi oleh sesuatu yang berada di luar manusia, yaitu dewa. Manusia tidak ditempatkan sebagai unsur yang otonom dalam perubahan sejarah. Tampilnya para raja dianggap sebagai manifestasi dari kekuatan dewa.

Dalam historiografi tradisional, kekuatan penggerak sejarah masih dilihat sebagai kekuatan kosmis. Sejarah tidak dibedakan dari alam⁴. Sejarah berjalan tanpa dipengaruhi atau ditentukan oleh aksi atau motivasi manusia. Dalam lingkungan sosio-kultural historiografi tradisional pada cerita sejarah ada kekuatan religio-magis. Penggerak sejarah adalah kekuatan-kekuatan magis. Perubahan politik merupakan wangsit yang diterima raja bukan bersifat kemanusiaan. Jadi kausalitas sejarah dikembalikan pada kekuatan supranatural.⁵

Historiografi berkembang, dari tradisional menuju modern seiring tingkat perkembangan sosio-kultural masyarakat. Berbeda dengan tradisional, modern menggunakan pendekatan kritis, dalam memberikan eksplanasi sejarah menggunakan ilmu sejarah yang ilmiah. Kekritisannya pada historiografi modern, yaitu dengan menempatkan peran manusia sebagai aktor peristiwa sejarah. Penggerak sejarah adalah manusia sendiri.

Abdurrahman Suryomihardjo dan Taufik Abdullah melihat perkembangan historiografi Indonesia dalam 3 bentuk, yaitu sejarah ideologis, sejarah pewarisan, dan sejarah akademik.⁶ Sejarah yang ideologis adalah penulisan sejarah yang mencari arti subyektif dari peristiwa sejarah. Sejarah pewarisan ditandai dengan penulisan sejarah sebagai kisah kepahlawanan perjuangan kemerdekaan. Sementara, sejarah akademik adalah penulisan sejarah yang tidak bersifat ideologis atau tidak bersifat filosofis. Namun dalam penulisan sejarah ini mencoba memberikan gambaran masa silam yang ditopang dengan menggunakan tradisi akademik. Dari ketiga jenis tersebut, historiografi dapat dikelompokkan menjadi 2, konvensional dan modern. Penulisan sejarah yang konvensional dalam pembelajaran bisa bersifat ideologis karena dalam model pendekatan sejarah seperti ini lebih ditekankan pada penanaman nilai. Sejarah diajarkan bukan sebagai pengetahuan dan penalaran, tetapi sebagai sesuatu yang harus diteladani.

Sebagai hasil karya sejarah, selain pengungkapan fakta sejarah, akan pula menunjukkan ungkapan dari penulis sejarah tersebut. Ungkapan penulis sejarah tersebut dapat dilihat dari pandangannya, interpretasinya, pendekatannya, penyeleksian data, struktur

⁴ Taufik Abdullah dan Abdurrachman Suryomihardjo, "Arah Gejala dan Perspektif Studi Sejarah Indonesia", dalam Taufik Abdullah dan Abdurrachman Suryomihardjo, ed., (1985), Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif, Jakarta : Gramedia.

⁵ Ibid

⁶ Ibid

rekonstruksinya, dan sebagainya. Dalam pemahaman ini, historiografi bersifat subjektif. Dimensi-dimensi subjektivitas itu, sedikit banyaknya dipengaruhi persepsi penulis sejarah terhadap masa lampau masyarakatnya.

Jadi penulisan sejarah bukanlah semata-mata merupakan reproduksi masa lampau atau cerita dari peristiwa-peristiwa sejarah kronologis. Penulisan sejarah sebagai salah satu bentuk perwujudan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kultur. Penulis sejarah yang turut mengambil bagian dalam kehidupan kultur secara aktif akan menghadapi dan memahami fakta-fakta historis dengan pandangan dan permasalahan yang berasal dari kebudayaan itu.

Historiografi Indonesia mau tidak mau akan mengikuti dan mencerminkan perubahan-perubahan dalam dalam kebudayaan kita. Kalau kebudayaan agraris feudal dengan pemujaan raja menciptakan historiografi yang bersifat regiocentris atau raja centris, kolonialisme menghasilkan historiografi yang Neerlandocentris, maka nasionalisme dengan tercapainya hasil perjuangan, pembentukan RI menuntut suatu historiografi yang sesuai dengan kehidupan kebudayaan nasional.

Historiografi Indonesia dimunculkan dalam buku teks-teks pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah. Penggunaan buku-buku sejarah akan mengacu pada kurikulum pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya kurikulum mata pelajaran sejarah. Penyusunan sebuah kurikulum membutuhkan adanya landasan. Landasan ini penting untuk dijadikan dasar bagi arah yang diinginkan dari produk yang dihasilkan. Ada dua landasan penting dalam penyusunan kurikulum yaitu landasan filosofis dan landasan politis.⁷

Landasan filosofis penyusunan kurikulum mengacu pada aliran essentialisme. Aliran ini berpandangan pendidikan pada dasarnya adalah pendidikan keilmuan. Kecemerlangan ilmu adalah sesuatu yang harus dijadikan kepedulian setiap generasi sebab hanya melalui penguasaan ilmu masyarakat berkembang.⁸ Sekolah harus mengajarkan disiplin ilmu kepada siswa. Sedangkan landasan politis berkaitan dengan kebijakan politik pemerintah. Dalam penyusunan kurikulum biasanya pemerintah memiliki kepentingan politik tersendiri sehingga pemerintah memasukkan pesan-pesan tersendiri dari isi kurikulum tersebut.

⁷ S. Hamid Hasan (1995). Pendidikan Ilmu Sosial. Jakarta: Depdikbud, hlm 53-56.

⁸ Ibid

Pendidikan sejarah merupakan salah satu pelajaran yang memiliki kepentingan politik yang sangat besar. Salah satu misi dari pelajaran sejarah adalah menanamkan rasa cinta tanah air bagi peserta didik. Rasa cinta tanah air merupakan salah satu sikap dari kesetiaan seorang warga negara terhadap bangsanya. Tumbuhnya kesetiaan merupakan bentuk dari pengakuan seorang warga negara terhadap eksistensi bangsanya. Sedangkan eksistensi bangsa merupakan produk dari sejarah.⁹ Oleh karena itu, sejak awal kemerdekaan pemerintah memiliki kepedulian yang besar terhadap perumusan kurikulum pendidikan.

2. Dinamika Historiografi Indonesia

Sejarah Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang sudah diberikan di sekolah-sekolah sejak awal kemerdekaan, bahkan pelajaran sejarah sudah ada di sekolah-sekolah sejak jaman penjajahan Belanda. Namun pada saat itu, pemerintah belum menetapkan standar resmi yang resmi bagi kepentingan penulisan buku teks pelajaran sejarah yang memiliki kepentingan nasional. Dari buku-buku tersebut masih banyak bersumber dari buku-buku yang ditulis oleh penulis Belanda, buku-buku tersebut memang menggunakan judul dengan istilah Sejarah Indonesia yang dibedakan dengan judul Sejarah Hindia Belanda, tetapi isi dari buku-buku tersebut masih menunjukkan uraian yang cenderung Neerlandocentris. Bangsa Indonesia tidak menjadi pelaku utama dalam sejarah, tetapi bangsa asing yang menjadi pelaku utama.

Karena pada waktu itu, buku-buku sejarah yang banyak beredar adalah buku-buku sejarah yang Neerlandosentris. Sehingga perlu adanya dekolonisasi bagi penulisan sejarah Indonesia¹⁰. Muncul kebutuhan untuk menulis kembali sejarah Indonesia dari kacamata Indonesia. Maka mulai pada tahun 1960an, terbit buku-buku teks sejarah yang sudah mulai menampilkan penulisan yang Indonesiacentris.

Hal ini terlihat pada buku sejarah Indonesia SMA karangan Soendhoro yang mengikuti kurikulum 1964. Ia menguraikan bahwa bangsa Indonesia sudah ada sejak sebelum kedatangan agama Hindu Buddha. Perbedaan suku yang ada di Indonesia bukanlah

⁹ Sartono Kartodirdjo, "Kebangsaan, Sejarah Nasional dan Proses Integrasi Negara dalam P. J. Suwarno, Negara dan nasionalisme Indonesia (1995) Jakarta; Gramedia, hlm 5

¹⁰ Sartono kartodirdjo, "Kata Pengantar Editor Umum", dalam Sartono Kartodirdjo, et. Al., (1997), Sejarah nasional Indonesia I. Jakarta: Balai Pustaka.

suatu pemisahan karena sebenarnya bangsa Indonesia berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Yunan Utara (Cina Selatan). Konsepsi Indonesia sebagai sebuah kesatuan geopolitik digambarkan dengan lahirnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Upaya untuk merumuskan penulisan sejarah Indonesia yang Indonesiacentris oleh pemerintah, dimulai sejak tahun 1951 dengan dibentuknya panitia yang bertugas menyusun buku sejarah nasional. Panitia ini belum dapat bekerja. Realisasi pemikiran tentang perlunya sejarah yang dilihat dari kacamata Indonesia mulai tampak dengan diadakannya Seminar Nasional Sejarah yang pertama di Jogjakarta tahun 1957. Dalam seminar tersebut dibahas pula pentingnya penulisan buku teks sejarah bagi pelajaran di sekolah-sekolah.

Pada tahun 1963, dibentuk panitia yang bertugas menyusun kembali sejarah Indonesia. Panitia ini tidak dapat bekerja karena situasi politik saat itu. Baru melalui Seminar Nasional Sejarah yang kedua di Yogyakarta tahun 1970, diputuskan pembentukan panitia penyusunan kembali sejarah Indonesia. Panitia ini berhasil menyusun sejarah Indonesia sebanyak 6 jilid atau sering dikenal dengan istilah buku babon sebagai buku standar Sejarah Nasional Indonesia.

Lahirnya buku Sejarah Nasional Indonesia pada hakekatnya merupakan kelanjutan ide dari Seminar Sejarah Nasional yang pertama di Yogyakarta 1957. Salah satu rekomendasi yang terpenting dari Seminar Sejarah yang pertama adalah perlunya penulisan kembali sejarah Indonesia yang Indonesiasentris, menulis sejarah Indonesia dari kacamata bangsa Indonesia.

Lalu pada tahun 1982 lahir Pendidikan Sejarah Bangsa (PSPB). Ditinjau dari sudut historiografi, PSPB dapat dikelompokkan ke dalam penulisan yang ideologis. Penulisan yang ideologis mengandung arti bahwa pengajaran sejarah dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme bukan sekedar menambah pengetahuan belaka. Kebenaran sejarah ditentukan oleh pemerintah melalui penyusunan kurikulum PSPB oleh pemerintah. Kepentingan politik pemerintah dalam pengajaran sejarah sangatlah dominan. Pemilihan peristiwa sejarah yang ditampilkan dalam PSPB didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai patriotisme yang terkandung pada peristiwa tersebut. Pengajaran PSPB lebih ditekankan pada aspek afektif atau nilai-nilai perjuangan yang digambarkan dalam sejarah bangsa

Indonesia. Bahkan kelahiran PSPB harus melalui produk keputusan politik yang sangat tinggi yaitu melalui sidang Umum MPR tahun 1982.

PSPB mengilhami lahirnya buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1, 2, dan 3 yang hingga kini digunakan di tingkat SD, SMP, dan SMA. Pada dasarnya buku ini bersumber pada 6 jilid buku sejarah nasional. Ketiga buku tersebut ditulis berdasarkan pada periodenisasi. Jilid pertama berisi tentang pra sejarah Indonesia sampai dengan munculnya kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Jilid kedua berisi zaman penjajahan bangsa Barat serta perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Jilid ketiga berisi pergerakan nasional sampai Reformasi. Ketiga jilid buku tersebut diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan merupakan buku standar versi pemerintah yang digunakan pada pelajaran sejarah di sekolah, sehingga disebut juga dengan istilah buku paket. Di tahun 1980an terbit pula buku-buku teks pelajaran sejarah untuk SMA yang diterbitkan oleh pihak swasta. Baik buku paket maupun buku terbitan swasta yang dipakai di SMA sifat indonesiacentris mulai diperlihatkan. Dalam buku ini, orang-orang Indonesia menjadi pelaku utama dalam sejarah. Tidak hanya itu, unsur Indonesiacentris pada ketiga jilid buku tersebut juga terlihat pada judul sejarah nasional. Label nasional menunjukkan bahwa buku tersebut adalah buku sejarah bangsa Indonesia.

3. Analisis Buku Teks Sejarah

Buku sejarah terbitan pemerintah Orde Baru dimulai dengan sejarah Indonesia sejak jaman purba. Dituliskan bahwa bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang sudah tua sejarahnya dengan ditemukannya manusia purba. Manusia purba Indonesia termasuk salah satu yang tertua di dunia. Lalu diceritakan pula bahwa ada dasarnya kita berasal dari nenek moyang yang sama yaitu bangsa Yunan Utara. Sejak zaman prasejarah bangsa Indonesia sudah memiliki kebudayaan yang mapan. Kondisi geografis wilayah Indonesia yang sebagian besar merupakan lautan telah membentuk bangsa Indonesia sebagai pelaut ulung sejak dulu. Lahirnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dinyatakan sebagai konsepsi Indonesia sebagai sebuah kesatuan geopolitik. Keruntuhan kedua kerajaan ini karena mengalami disintegrasi politik dan kelahiran kerajaan-kerajaan Islam digambarkan sebagai kontinuitas kesatuan geopolitik Indonesia.

Terlepas dari benar atau tidaknya ulasan sejarah di atas, tapi apakah kisah tersebut dapat digolongkan sebagai sejarah nasional? Sejarah nasional diartikan sebagai sejarah yang mulai pada hari Proklamasi Indonesia yaitu saat bangsa Indonesia sebagai satu bangsa berhasil membentuk negara dan menjadi suatu kesatuan geopolitik yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Untuk memperlengkap gambaran historis perlu ditambahkan sejarah-sejarah lokal sebagai kesatuan politik yang lebih kecil. Namun ini tidak berarti bahwa sejarah nasional dapat disamakan dengan kumpulan-kumpulan sejarah lokal¹¹. Seperti sejarah dunia yang bukan sama sekali kumpulan sejarah-sejarah nasional belaka. Tidak semua fakta-fakta historis lokal dapat dimasukkan dalam sejarah nasional, tetapi perlu diseleksi. Dalam proses seleksi itu diperlukan sudut pandang.

Hal serupa juga terlihat pada peninggalan kerajaan Hindu Buddha dan kerajaan Islam. Peninggalan tersebut dianggap sebagai peninggalan bangsa Indonesia. Padahal jika ditilik lebih jauh maka peninggalan candi, stupa, prasasti, mesjid, adalah peninggalan kerajaan-kerajaan pada masa itu. Misalnya, Candi Borobudur yang diklaim dalam buku-buku teks sejarah sebagai warisan sejarah dan hasil karya bangsa Indonesia. Padahal candi tersebut merupakan peninggalan kerajaan Mataram Lama pada masa pemerintahan Samaratungga yang dibangun pada tahun 850 M, jauh sebelum Indonesia ada.

Dalam upaya menimbulkan kesamaan historis dalam buku-buku teks sejarah, ada beberapa bagian yang dihilangkan atau dikaburkan. Salah satunya adalah fakta bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Prof. Mr. Gertudes Johan Resink membantah pernyataan tersebut dalam buku “Mereka Telah Menulis Sejarah” tahun 1996. Berdasarkan studi hukum internasional, Resink¹² membuktikan bahwa sebenarnya Belanda tidak menjajah negeri ini selama 350 tahun, apabila yang dimaksud seluruh kepulauan Indonesia.¹³ Resink¹⁴ mengacu kepada beberapa kasus pengadilan, dimana hakim dan mahkamah agung Hindia Belanda berkesimpulan bahwa mereka tidak memiliki wewenang mengadili perkara karena yang bersangkutan dianggap bukan penduduk Hindia Belanda melainkan rakyat

¹¹ Sartono Kartodirdjo. Beberapa Persoalan sekitar Sedjarah Indonesia. Perpustakaan Fakultas Sastra UI.

¹² Asvi Warman Adam. (2007). *Seabad Kontroversi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

kerajaan atau negeri pribumi yang merdeka. A. B. Lopian¹⁵ juga mengungkapkan hal senada bahwa cukup banyak negeri-negeri di Sumatera dan Indonesia bagian timur yang masih merdeka.

Terlepas dari kontroversi sejarah, daerah di Indonesia yang pernah atau tidak dijajah Belanda. Hampir sebagian besar sejarawan sepakat bahwa tidak tepat dikatakan bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad, jika ini merujuk pada keseluruhan kepulauan di Indonesia. Bahkan pada tahun 1960an, Soeroto¹⁶ dalam buku sejarah yang ditulisnya, telah menolak anggapan bahwa Indonesia dijajah selama 3,5 abad. Jadi penjajahan Belanda yang dikatakan selama 3,5 abad tidak lebih dari mitos politik belaka. Lebih lanjut, Resink¹⁷ mengatakan bahwa implikasi dari mitos ini adalah bahwa seolah-olah begitu Cornelius de Houtman mendarat di Banten, seluruh kepulauan Indonesia jatuh di bawah kekuasaan Belanda.

Begitu juga dengan label pahlawan pejuang kemerdekaan. Dalam buku teks sejarah Indonesia disebutkan sejumlah nama tokoh pejuang kemerdekaan. Pada abad-17 dan 18 perlawanan terhadap penjajah digerakkan oleh Sultan Agung di Mataram, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Hasanuddin di Makassar, Iskandar Muda di Aceh, dan Untung Surapati di Jawa Timur. Lalu, pada abad 19, perjuangan melawan Belanda dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Mataram, Imam Bonjol di Minangkabau, Teuku Umar di Aceh dan lain-lain. Padahal sebenarnya pada waktu itu, para pejuang tersebut tidak memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka memperjuangkan kerajaan dan daerahnya masing-masing.

Selain itu, bagian sejarah yang kabur adalah dipilihnya tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional yang tidak lain adalah tanggal lahirnya Budi Utomo. Pemilihan tanggal tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan di kemudian hari. Budi Utomo memang diakui sebagai organisasi modern pertama di nusantara, tetapi ruang lingkup keanggotaannya masih terbatas kepada orang Jawa khususnya kalangan priyayi. Meskipun Budi Utomo terdiri atas masyarakat Sunda dan Madura, namun kalangan priyayi Jawa menjadi kelompok inti pendukung Budi Utomo. Sebagai tambahan, Budi Utomo tidak pernah memperoleh

¹⁵ Ibid

¹⁶ Asvi Warman Adam. (2007). *Seabad Kontroversi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

¹⁷ Ibid

dukungan rakyat yang nyata pada kelas bawah dan jumlah anggotanya hanya paling banyak sekitar 10.000 orang, pada akhir tahun 1909. Jumlah anggota tersebut masih terlalu jauh dengan anggota Sarekat Islam yang mencapai 500.000 orang. Kehadiran Budi Utomo menandai fase pertama dari nasionalisme Indonesia yang menurut Suhartono,¹⁸ menunjuk pada etnonasionalisme dan proses penyadaran diri terhadap identitas Jawa sebagai representasi identitas Indonesia.

Etnonasionalisme Jawa juga terlihat dalam paparan tentang perjuangan kemerdekaan. Tidak semua aspek dimunculkan. Pahlawan nasional yang banyak muncul dalam buku-buku teks sejarah mayoritas berasal dari Jawa. Begitu juga dengan perang dalam rangka merebut kemerdekaan, porsi yang banyak dibahas adalah perang di daerah Jawa. Tidak hanya sampai di situ, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dan Islam yang lebih banyak dibahas dalam buku-buku teks pelajaran sejarah adalah kerajaan-kerajaan yang berada di pulau Jawa.

4. Buku Teks Sejarah dan Hegemoni Identitas Nasional

Jika ditinjau dari teori Hegemoni oleh Antonio Gramsci,¹⁹ hegemoni adalah sebuah arena pertarungan antara kelompok dominan dan subordinat dimana dalam konsep hegemoni terdapat 3 kombinasi tiga proses kultural yaitu tradisi, institusi, dan formasi. Negara dalam hal ini pemerintah menentukan tradisi yang kemudian disalurkan melalui institusi-institusi sehingga akhirnya menjadi formasi atau nilai dominan yang diterima oleh masyarakat. Menurut Gramsci, institusi yang berperan dalam menyalurkan pesan di antara tradisi dan formasi adalah institusi media massa. Dengan demikian, media massa menjadi instrumen hegemoni.

Pada kasus ini, mengacu pada definisi media massa menurut McQuail, buku teks sejarah merupakan salah satu bentuk media massa tradisional.²⁰ Sehingga buku teks ini dapat dianggap sebagai institusi yang menjadi corong pemerintah sebagai kelompok dominan kepada rakyat sebagai kelompok subordinat. Lebih lanjut, buku teks sejarah menjadi instrumen hegemoni pemerintah Orde Baru untuk menyalurkan tradisi yakni identitas

¹⁸ Ibid

¹⁹ Michael O'Shaughnessy & Jane Stadler. (2005). *Media and Society: An Introduction*. New York: Oxford University Press.

²⁰ Denis McQuail. 2011. *Teori Komunikasi Massa* McQuail, Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba

nasional melalui kurikulum pendidikan sejarah untuk membentuk formasi atau nilai dominan mengenai definisi identitas nasional. Analisa ini didukung dengan fakta bahwa sejarah Indonesia adalah mata pelajaran wajib yang diajarkan sejak SD hingga SMA, akan tetapi secara garis besar tidak ada perbedaan muatan buku teks sejarah SD, SMP, maupun SMA. Hal ini sebenarnya menunjukkan ada nilai yang berusaha ditanamkan sejak dini secara terus-menerus.

Lebih jauh lagi, kasus ini dapat juga dianalisis dengan konsep *imagined community* menurut Benedict Anderson. Bangsa Indonesia adalah sebuah komunitas yang dibayangkan, terbatas dan berdaulat dimana salah satu alasan seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai satu bangsa adalah kesamaan. Makin banyak kesamaan, maka akan semakin besar keterikatan emosional yang terbentuk sebagai satu bangsa. Dalam konteks Indonesia, satu-satunya kesamaan yang ada adalah kesamaan historis. Kesamaan historis dimunculkan salah satunya dengan cerita (mitos/mite) yang muncul belakangan, dikaitkan dengan mitos yang terjadi sebelumnya, yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Dalam hal ini, sejarah sebelum proklamasi dimunculkan sebagai sejarah nasional untuk menciptakan kesamaan historis. Pemilihan identitas Jawa sebagai representasi identitas nasional juga dilakukan untuk mereduksi perbedaan sehingga memunculkan kesamaan. Dengan demikian, buku teks sejarah Indonesia era Orde Baru menjadi alat reproduksi identitas nasional yang homogen untuk menciptakan suatu “komunitas yang dibayangkan”. Kapasitas menciptakan dan mempertahankan komunitas yang dibayangkan ini dipengaruhi oleh banyak proses dan salah satu yang sangat penting adalah melalui media massa. Keberadaan buku teks sejarah Indonesia memungkinkan masyarakat untuk terus membayangkan bahwa mereka berada dalam masyarakat yang sama.

Sebenarnya, dalam pembentukan identitas nasional terdapat perbedaan pandangan. Mantan Presiden Sukarno mengatakan, “kebangsaan Indonesia itu adalah kebangsaan Indonesia yang bulat. Bukan kebangsaan Jawa, Borneo, atau lain-lain. Tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu *nationale staat*.”²¹ Dengan kata lain, Sukarno berpandangan bahwa identitas nasional adalah meleburnya identitas kedaerahan ke

²¹ Krjogja.com. Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 tentang Pancasila (IV). Diakses pada 29 Desember 2017 dari http://krjogja.com/web/news/read/34356/Pidato_Bung_Karno_1_Juni_1945_tentang_Pancasila_IV

dalam satu identitas nasional sebagai identitas bangsa Indonesia. Di sisi lain, Ki Hadjar Dewantara mengemukakan gagasan tentang “kebudayaan nasional yang merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah”²² yang berarti masing-masing kebudayaan daerah tetap mempertahankan ciri khasnya sehingga mampu melahirkan identitas bangsa Indonesia yang khas pula.

Dalam hal ini, pemerintah lebih cenderung pada pandangan yang dikemukakan oleh Mantan Presiden Sukarno yakni menciptakan satu identitas nasional dengan meleburkan identitas lokal. Hanya saja pada masa Orde Baru, pemerintah memaksakan budaya dominan yakni budaya Jawa sebagai identitas nasional. Maka yang terjadi adalah hegemoni identitas nasional atas identitas lokal. Persatuan yang diharapkan adalah meleburnya budaya daerah dalam budaya nasional dengan budaya Jawa sebagai budaya dominan.

C. Penutup

Ada upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah Orde Baru melalui teks-teks yang diselipkan dalam buku-buku teks mata pelajaran sejarah untuk memunculkan kesamaan historis. Tujuan dari kesamaan historis adalah membentuk perasaan senasib. Dengan perasaan senasib tersebut, maka terhegemoni dengan rasa senasib dan menerima identitas sebagai satu bangsa. Namun sayangnya dalam identitas nasional tidak merepresentasikan budaya Indonesia secara keseluruhan bahkan ada kebudayaan yang dominan, yakni kebudayaan Jawa. Bahkan dalam penulisan buku-buku teks pelajaran sejarah, jawa-centris juga terlihat.

Sementara, kebudayaan lokal lainnya terus-menerus dipaksa untuk menyatu. Banyak suara yang termarginalkan. Impilikasi dari kesamaan historis yang dipaksakan dan hegemoni identitas nasional yang timpang adalah potensi perpecahan. Persatuan tanpa kesetaraan menimbulkan perlawanan dari kelompok yang dimarginalkan berupa gejolak perpecahan dan konflik yang menjurus pada disintegrasi bangsa. Gejolak untuk pemisahkan diri dari NKRI adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap hegemoni identitas nasional.

²² Muhammad Takari. Konsep dan Aplikasi Kebudayaan Nasional. Diakses dari www.etnomusikologiusu.com/uploads/1/8/0/0/1800340/makalahharkitnas.pdf

Tidak pernah ada yang baik dari sesuatu yang dipaksakan, termasuk sejarah. Profesor sejarah di Universitas Sorbonne Paris, Francois Caron mengatakan, “Tatkala sejarah menyadarkan kita tentang perbedaan-perbedaan, ia sebetulnya telah mengajarkan toleransi dan kebebasan.” Namun sayang, perbedaan itu yang tidak pernah dimunculkan dalam buku-buku teks pelajaran sejarah Indonesia di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asvi Warman Adam. (2007). *Seabad Kontroversi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Amiruddin. (1998). *Materi Pelajaran PPKN dan Tata Negara untuk SMU*. Daerah Istimewa Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Benedict Anderson. (2008). *Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang)*. Jakarta: Insist Press & Pustaka Pelajar.
- Denis McQuail. (2011). *Teori Komunikasi Massa* McQuail, Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba
- Krjogja.com. Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 tentang Pancasila (IV). Diakses pada 29 Desember 2017 dari http://krjogja.com/web/news/read/34356/Pidato_Bung_Karno_1_Juni_1945_tentang_Pancasila_IV
- S. Hamid Hasan. (1995). *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Depdikbud.
- Sartono Kartodirdjo. (1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Sartono Kartodirdjo. (1992). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Michael O'Shaughnessy & Jane Stadler. (2005). *Media and Society: An Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Takari, Muhammad. Konsep dan Aplikasi Kebudayaan Nasional. Diakses dari www.etnomusikologiusu.com/uploads/1/8/0/0/1800340/makalahharkitnas.pdf.
- Taufik Abdullah dan Abdurrachman Suryomihardjo. (1985). *Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia.